



KABUPATEN SERUYAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA - SKPD) TAHUN ANGGARAN 2018

DPA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 4.02.00. - PPKD
PENGGUNA ANGGARAN :
NAMA : dr. Bahrhun Abbas, MPH
NIP : 19670909 199509 1 001
JABATAN : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		Formulir DPA-PPKD
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2018		
Urusan Pemerintahan : 4.02. - KEUANGAN		
Organisasi : 4.02.00. - PPKD		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	1.029.294.829.732,74
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.971.640.494,21
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.081.708.668,04
4.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.081.708.668,04
4.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	6.081.708.668,04
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.889.931.826,17
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	10.928.368.652,81
4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	10.928.368.652,81
4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	437.475.675,72
4.1.4.05.01.	Kerugian Uang daerah	437.475.675,72
4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.524.087.497,64
4.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.524.087.497,64
4.2.	DANA PERIMBANGAN	901.216.766.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83.533.157.000,00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	38.831.634.000,00
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	34.471.219.000,00
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	4.360.415.000,00
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	44.701.523.000,00
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	23.741.357.000,00
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	943.027.000,00
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Gas bumi dan Minyak Bumi	35.948.000,00
4.2.1.02.12.	Bagi Hasil dari Mineral Batuan	19.981.191.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	616.493.956.000,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	616.493.956.000,00
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	616.493.956.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	137.310.000.000,00
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus	137.310.000.000,00
4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	45.574.000.000,00
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	83.862.000.000,00
4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Afirmasi	7.874.000.000,00
4.2.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	54.629.653.000,00
4.2.4.01.	DAK Non Fisik	54.629.653.000,00
4.2.4.01.01	Tunjangan Guru Non Sertifikasi	1.563.000.000,00
4.2.4.01.02.	Tunjangan Guru Sertifikasi	24.092.428.000,00
4.2.4.01.03.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.003.600.000,00
4.2.4.01.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	9.649.751.000,00
4.2.4.01.05.	Akreditasi Puskesmas	750.000.000,00
4.2.4.01.06.	Jaminan Persalinan	2.853.340.000,00
4.2.4.01.07.	Bantuan Operasional KB	2.921.290.000,00
4.2.4.01.08.	Tunjangan Khusus Guru	8.898.253.000,00
4.2.4.01.09.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	897.991.000,00

4.2.5.	Dana Insentif Daerah.	9.250.000.000,00
4.2.5.01.	Dana Insentif Daerah..	9.250.000.000,00
4.2.5.01.01.	Dana Insentif Daerah	9.250.000.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.106.423.238,53
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.606.423.238,53
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21.124.214.238,53
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21.124.214.238,53
4.3.3.04.	Alokasi Dana Desa	84.482.209.000,00
4.3.3.04.01.	Alokasi Dana Desa (ADD)	84.482.209.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	1.500.000.000,00
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.029.294.829.732,74
5.	BELANJA	209.802.185.749,54
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	209.802.185.749,54
5.1.3.	Belanja Subsidi	1.800.000.000,00
5.1.3.01.	Belanja Subsidi	1.800.000.000,00
5.1.3.01.03.	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.800.000.000,00
5.1.4.	Belanja Hibah	40.407.133.800,00
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	32.519.319.800,00
5.1.4.01.02.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Pemerintah	32.519.319.800,00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.677.036.000,00
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	4.677.036.000,00
5.1.4.06.	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan	3.210.778.000,00
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar Swasta	150.302.000,00
5.1.4.06.02.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Pertama Swasta	146.876.000,00
5.1.4.06.04	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta	2.913.600.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	443.897.200,00
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	118.897.200,00
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	118.897.200,00
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	325.000.000,00
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang Tidak direncanakan	250.000.000,00
5.1.5.03.02.	Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan	75.000.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.300.000.000,00
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.300.000.000,00
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.300.000.000,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	157.757.772.300,00
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	245.000.000,00
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi....	245.000.000,00
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	156.793.820.300,00
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	156.793.820.300,00
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	718.952.000,00
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik....	718.952.000,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.093.382.449,54
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	3.093.382.449,54
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	3.093.382.449,54
	JUMLAH BELANJA	209.802.185.749,54
	SURPLUS/(DEFISIT)	819.492.643.983,20
6.	PEMBIAYAAN	60.378.505.608,89
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.878.505.608,89
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	66.878.505.608,89
6.1.1.02.	SILPA DAU/PAD	66.878.505.608,89
6.1.1.02.01.	SILPA Dana Alokasi Umum / Pendapatan Asli Daerah	66.878.505.608,89
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	66.878.505.608,89

